



LKPJ TAHUN ANGGARAN 2022



KECAMATAN METRO BARAT TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga tersusunlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Metro Barat Tahun 2022. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Metro Barat dimaksudkan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja Kecamatan Metro Barat.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ Kecamatan Metro Barat ini memuat Program dan sasaran pelaksanaan kegiatan, kondisi organisasi perangkat daerah, kondisi sarana prasarana, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami menyadari dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawab ini masih banyak yang perlu mendapat penyempurnaan penyempurnaan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk sebuah kemajuan dan kesempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini

Metro BaratI, Januari 2023

CAMAT METRO BARAT,


TRIYONO, S.Sos

Pembina

NIP. 19680722 199402 1 002

BAB I.

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Data Umum Daerah

Kondisi Geografis

Secara Geografis Kecamatan Metro Barat berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Metro Pusat
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Selatan
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Metro Selatan
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah

Kecamatan Metro Barat merupakan Pemekaran dari Kecamatan Bantul berdasarkan Perda Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro menjadi 5 Kecamatan yang meliputi 22 Kelurahan. Luas Wilayah Kecamatan Metro Barat adalah 11,28 km persegi, dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut ;

- a. Kelurahan Mulyojati 3,03 Km persegi
- b. Kelurahan Mulyosari 2,95 Km persegi
- c. Kelurahan Ganjar Agung 2,88 Km persegi
- d. Kelurahan Ganjar Asri 2,42 Km Persegi

Ketinggian Kecamatan Metro Barat dari permukaan laut adalah 40 M dan topografi 3 m s/d 12 m. Sedangkan suhu udara rata-rata di Kecamatan Metro Barat adalah 30-35 derajat Celsius.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Metro Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, terdiri dari

1. 1 (satu) Eselon III. A
2. 5 (lima) Eselon IV.A
3. dan 2 (Dua) Eselon IV.B

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut :

1. Camat.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kecamatan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Seksi Pembangunan.
5. Seksi Perekonomian.
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Metro Barat memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Pegawai Kecamatan Metro Barat saat ini berjumlah 84 orang terdiri dari 45 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 39 Orang Tenaga Kontrak.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas

Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota Metro untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. Fungsi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya diuraikan penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Metro Barat sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

KECAMATAN

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspekn : rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELURAHAN

Lurah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Camat dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kelurahan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

1. SEKRETARIAT KELURAHAN

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga dengan penjabaran tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Menyusun rencana dan pembinaan administrasi urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada lurah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

2. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana penyiapan administrasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan administrasi pemerintahan dibawahnya serta administrasi kependudukan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. Menyusun program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- c. Menyusun program serta pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, serta pengolahan data dan pelaporan muatsi penduduk dan catatan sipil;
- e. Membina bidang pertanahan;
- f. Menyusun program pembinaan/pengembangan potensi (sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi) dan tertib administrasi;
- g. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang pemerintahan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana penyiapan administrasi dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta

membina potensi swadaya masyarakat dan menyusun rencana serta mengkoordinasikan kegiatan pembinaan perekonomian rakyat, pengembangan koperasi serta peningkatan pendapatn asli daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program koordinasi rencana pembangunan;
- b. Menyusun program evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan kelurahan;
- c. Menyusun program pembinaan potensi swadaya masyarakat;
- d. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;an bidang fisik;
- e. Menyusun program pembinaan dan pengembangan perkoperasian, sistem arisan, perkreditan rakyat dan usaha-usaha informal serta lemabaga ekonomi dan usaha bersama
- f. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana serta mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan masyarakat, sosial dan lingkungan hidup, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dans/bantuan etrhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- f. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodakoh;
- g. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia;;
- h. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II.**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****A. BELANJA OPERASIONAL**

Pada Tahun 2022 Kecamatan Metro Barat melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 27 Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.514.001.545,00** dengan realisasi keuangan secara keseluruhannya sebesar **Rp. 7.321.015.384,00** dengan persentase capaian anggaran sebesar **97,43%**.

BAB III.

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Kecamatan Metro Barat telah melaksanakan 5 program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Pada tahun 2022 kecamatan Metro Barat telah melaksanakan 5 Program 11 Kegiatan dan 27 Sub kegiatan dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan pelayanan perizinan
- 7. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Evaluasi Kelurahan
- 8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
- 9. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrriban Umum
 - Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 10. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas sebagaimana dalam table 10 dan Tabel 11 terlampir.

Tabel 10
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Metro Barat	Perwali Kota Metro Nomor 1 tahun 2020 tentang Penetapan Pagu Dana Kelurahan dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	100%	100%			tidak ada

				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 	terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan kecamatan yang disusun Jumlah RKA Kecamatan yang disusun	6 dokumen 2 dokumen (Renja murni , Renja perubahan) 2 dok (RKA Murni dan RKA Perubahan)	6 dok 2 dokumen (Renja murni , Renja perubahan) 2 dok (RKA Murni dan RKA Perubahan)		
				- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD 	Jumlah Dokumen Evaluasi Kecamatan yang disusun terlaksananya administrasi keuangan kecamatan Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan Jumlah pengelola administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dkomen (LAKIP dan LKPJ) Cakupan Pelayanan administrasi keuangan 48 ASN 21 THL dan 7 Pengelola Keuangan 12 bulan	2 Dkomen (LAKIP dan LKPJ) 100% 48 ASN 21 THL dan 7 Pengelola Keuangan 12 bulan		

				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan		
				Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Kecamatan	12 bulan	12 bulan		
				- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis Alat Listrik	10 Jenis Alat Listrik		
				- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	8 komputer unit PC All In one, 8 printer, 20 meja kerja, 20 kursi kerja stainless untuk kelurahan	8 komputer unit PC All In one, 8 printer, 20 meja kerja, 20 kursi kerja stainless untuk kelurahan		
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	ATK, Foto kopi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat, makan minum haian pegawai		
				- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket		
				- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	8 laporan	8 laporan		

				<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 	<p>Cakupan Penyediaan kebutuhan jasa kantor</p> <p>Jumlah materai yang disediakan</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan</p>	<p>100%</p> <p>354 materai</p> <p>2 laporan (tagihan listrik, telepon)</p>	<p>100%</p> <p>354 materai</p> <p>2 laporan (tagihan listrik, telepon)</p>		
				<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	<p>Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yg dipelihara</p> <p>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</p> <p>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</p> <p>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</p>	<p>3 jenis</p> <p>4 unit kendaraan</p> <p>3 Peralatan</p> <p>1 unit</p>	<p>3 jenis</p> <p>4 unit kendaraan</p> <p>3 Peralatan</p> <p>1 unit</p>		
				<p>2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p>	<p>Indek Kepuasan Masyarakat</p>	<p>82%</p>	<p>82%</p>		

				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	15 LK	15 LK		
				<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan <p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan pelayanan perizinan <p>3 PROGRAM PEMBERDYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di Kelurahan 	<p>Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan</p> <p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan</p> <p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan</p> <p>Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan</p> <p>Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan</p> <p>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah</p>	<p>12 bulan (4 kelurah)</p> <p>3 jenis dokumen</p> <p>3 jenis laporan</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>4 kelurahan 15 LK</p>	<p>12 bulan (4 kelurah)</p> <p>3 dokumen jenis</p> <p>3 jenis laporan (NIB : 2810 Rek. KK : 1179 dan Rek. Surat Nikah: 14)</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>4 kelurahan 15 LK</p>		

				Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. GANJAR AGUNG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Ganjar Agung yang Terbangun	1 paket sarpras kelurahan	5 cor blok 1 Drainase		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. GANJAR ASRI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Ganjar Asri yang Terbangun	1 paket sarpras kelurahan	5 cor blok, 3 drainase, 1 salran pembuangan air, 1 saluran air, 1 jembatan gorong-gorong		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. MULYOJATI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyosari yang Terbangun	1 paket sarpras kelurahan	4 cor blok , 2 drainase		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. MULYOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyojati i yang Terbangun	1 paket sarpras kelurahan	1 cor blok. 1 drainase 1 gorong-gorong, 1 jembatan gorong-gorong, 1 paket tempat bermian anak2		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan GANJAR AGUNG	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ganjar Agung	2 kegiatan	pelatihan sulam tapis dan rembuk stunting		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan GANJAR ASRI	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ganjar Asri	2 kegiatan	sulam tapis dan rembuk stunting		

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan MULYOJATI	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyosari	2 kegiatan	sulam tapis dan rembuk stunting		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan MULYOSARI	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyosari	2 kegiatan	rembuk stunting, edukasi pencegahan stunting pada ibu hamil, pelatihan kader keamanan pangan, keg. Forum anak, sosialisasi pernikahan dini, Sosialisasi bahaya narkoba		
				- Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelurahan	4 laporan monitoring dan evaluasi	4 laporan monitoring dan evaluasi		
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemsayarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	3 Lembaga Kemsayakatan (operasional TP-PKK Kec, Insentif IPM Kec. dan Keg. Lomba-lomba)	3 Lembaga Kemsayakatan (operasional TP-PKK Kec, Insentif IPM Kec. dan Keg. Lomba-lomba)		

			<p>4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p>	<p>100%</p> <p><i>12 kali</i></p>	<p>100%</p> <p><i>12 kali</i></p>		
			<p>- Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	<p>4 Laporan penyelenggaraan trantibmas kelurahan (Babinsa, Bhabinkamtipmas, FKPM dan Linmas)</p>	<p>4 Laporan penyelenggaraan trantibmas kelurahan (Babinsa, Bhabinkamtipmas, FKPM dan Linmas)</p>		
			<p>5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>	<p>Persentase penanganan konflik sosial masyarakat</p> <p>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah</p>	<p>100%</p> <p>12 bulan</p>	<p>100%</p> <p>12 bulan</p>		

		- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 kegiatan (HUT RI, HUT Kota)	nihil	karena pandemi Covid 19 kegiatan yang tidak terlaksana sesuai jadwal .	anggaran difokuskan untuk kegiatan penanganan Covid 19	
		KEL. AGUNG	jumlah kegiatan	2 Kegiatan (HUT RI dan HUT Kota)				

		KEL. GANJAR ASRI	jumlah kegiatan	2 Kegiatan (HUTRI dan HUT Kota)				
		KEL. MULYOJATI	jumlah kegiatan	2 Kegiatan (HUTRI dan HUT Kota)				
		KEL. MULYOSARI	jumlah kegiatan	2 Kegiatan (HUTRI dan HUT Kota)				
		Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6 kegiatan (LASQI, MTQ, Insentif Keagamaan, hibah bantuan rumah ibadah, safari Ramadhan, rukun kematian				

		Insentif Keagamaan Mulyojati	4 jenis insentif keagamaan (kaum, guru TPA, juru kunci makam, marbot	12 insentif Kaum, 60 insentif guru TPA, 2 insentif Juru kunci makam				
		Insentif Keagamaan Mulyosari	4 jenis insentif keagamaan (kaum, guru TPA, juru kunci makam, marbot	3 Kaum, 32 guru ngaji, 3 Juru kunci makam, 3 marbot				
		Insentif Keagamaan Ganjar Agung	4 jenis insentif keagamaan (kaum, guru TPA, juru kunci makam, marbot	4 kaum, 81 guru TPA, 2 juru kunci makam				
		Insentif Keagamaan Ganjar Asri	4 jenis insentif keagamaan (kaum, guru TPA, juru kunci makam, marbot	13 Kaum, 114 guru ngaji, 3 guru sekolah minggu, 3 Juru kunci makam, 10 marbot				

		Hibah Keagamaan Kel. Ganjar Agung	4 jenis hibah	4 jenis hibah (rumah ibadah, lasqi , rukun kematian dan safari ramadhan)				
		Hibah Keagamaan Kel. Ganjar Asri	4 jenis hibah	4 jenis hibah (rumah ibadah, lasqi , rukun kematian dan safari ramadhan)				
		Hibah Keagamaan Kel. Mulyojati	4 jenis hibah	4 jenis hibah (rumah ibadah, lasqi , rukun kematian dan safari ramadhan)				
		Hibah Keagamaan Kel. Mulyosari	4 jenis hibah	4 jenis hibah (rumah ibadah, lasqi , rukun kematian dan safari ramadhan)				

TABEL 11
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 (Rp)	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	6
		BELANJA DAERAH	7.514.001.545	7.321.015.384	97,43
		BELANJA OPERASI	7.514.001.545	7.321.015.384	97,43
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	4.491.645.068	4.316.561.404	96,10
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.897.600	12.837.600	99,53
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	5.800.350	5.800.350	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	4.597.350	4.537.350	98,69

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.499.900	2.499.900	100,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.112.784.533,00	3.952.130.660	1,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.112.784.533,00	3.569.083.310	0,96
		Belanja Pegawai	4.112.784.533,00	3.569.083.310	0,96
		Gaji dan Tunjangan PNS	3.725.147.183,00	2.919.802.182	0,96
		Gaji Pokok PNS/Uang Representatif	2.398.314.519,00	2.358.004.391	0,98
		Tunjangan Keluarga	203.713.889,00	185.524.430	0,91
		Tunjangan Jabatan	217.000.000,00	201.120.000	0,93
		Tunjangan Fungsional Umum	70.230.000,00	50.460.000	0,72
		Tunjangan Beras	145.546.080,00	124.200.300	0,85
		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.096.330,00	460.059	0,03
		Pembulatan Gaji	78.881,00	33.002	0,42
		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	672.167.484,00	185.524.430	0,91
		Tambahan Berdasarkan Beban Kerja	416.882.386,00	201.120.000	0,93
		Tambahan Berdasarkan Kondisi Kerja			0,72

			40.339.100,00	50.460.000	
		Tambahan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	8.680.979,00	124.200.300	0,85
		Tambahan Berdasarkan Prestasi Kerja	206.265.019,00	460.059	0,03
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.400.000	370.810.000	98,78
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.639.850	7.639.850	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.597.500	4.597.500	100,00
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.844.950	239.771.550	95,59
		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4.996.800	4.996.800	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.420.000	141.220.000	95,15
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.556.450	66.453.050	99,84
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.441.700	26.441.700	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.430.000	660.000	14,90

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.904.985	25.657.054	88,76
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.540.000	3.540.000	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	25.364.985	22.117.054	87,20
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.213.000	86.164.540	99,94
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.070.000	61.021.540	99,92
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.430.000	7.430.000	100,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.713.000	17.713.000	100,00
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.281.169.177	1.278.650.764	99,80
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.273.269.077	1.271.352.764	99,85

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	1.271.352.764	1.271.352.764	100,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat	7.900.100	7.298.000	
		pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan pelayanan perizinan	7.900.100	7.298.000	
3		PROGRAM PEMBERDYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	711.144.650	708.380.720	99,61
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	672.469.850	669.858.220	399
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di Kelurahan	18.800.000	18.800.000	100,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	514.492.000	512.262.000	99,57
		KELURAHAN GANJAR AGUNG	135.475.000	134.975.000	99,63
		KELURAHAN GANJAR ASRI	134.067.000	134.067.000	100,00
		KELURAHAN MULYOJATI	129.475.000	129.475.000	100,00
		KELURAHAN MULYOSARI	115.475.000	113.745.000	98,50

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	128.387.650	128.006.020	99,70
		KELURAHAN GANJAR AGUNG	28.999.800	28.662.560	98,84
		KELURAHAN GANJAR ASRI	25.387.850	25.343.460	99,83
		KELURAHAN MULYOJATI	30.000.000	30.000.000	100,00
		KELURAHAN MULYOSARI	44.000.000	44.000.000	100,00
		Evaluasi Kelurahan	10.790.200	10.790.200	100,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	38.674.800	38.522.500	99,61
		Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	38.674.800	38.522.500	99,61
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.200.000	11.200.000	100,00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.200.000	11.200.000	100,00
		Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.200.000	11.200.000	100,00

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.018.842.650	1.006.227.066	98,76
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	82.290.000	80.137.970	97,38
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	82.290.000	80.137.970	97,38
	KECAMATAN METRO BARAT	22.290.000	21.019.970	94,30
	KELURAHAN GANJAR AGUNG	15.000.000	14.859.000	99,06
	KELURAHAN GANJAR ASRI	15.000.000	14.859.000	99,06
	KELURAHAN MULYOJATI	15.000.000	14.400.000	96,00
	KELURAHAN MULYOSARI	15.000.000	15.000.000	100,00
	Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	936.552.650	926.089.096	98,88
	LASQI Kecamatan	15.610.000	15.226.500	97,54
	Insentif Keagamaan Mulyojati	114.600.000	114.600.000	100,00
	Insentif Keagamaan Mulyosari	60.900.000	60.900.000	100,00

		Insentif Keagamaan Ganjar Agung	131.700.000	131.700.000	100,00
		Insentif Keagamaan Ganjar Asri	199.800.000	199.800.000	100,00
		Hibah Keagamaan Kel. Ganjar Agung	85.980.650	80.059.600	93,11
		Hibah Keagamaan Kel. Ganjar Asri	136.000.000	133.992.996	98,52
		Hibah Keagamaan Kel. Mulyojati	85.962.000	84.572.000	98,38
		Hibah Keagamaan Kel. Mulyosari	106.000.000	105.238.000	99,28
		JUMLAH	7.514.001.545	7.321.015.384	97,43

B. PROSES PERENCANAAN

Perencanaan diawali dengan melalui dan menggunakan dasar;

1. RPJMD Kota Metro ;
2. RENSTRA Kecamatan Metro Barat ;
3. RENJA Kecamatan Metro Barat

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target output maupun target Indikator kinerja utama adalah :

1. Seiring dengan perkembangan teknologi yang tidak dibarengi dengan kemampuan aparatur kecamatan dan ketersediaan jumlah SDM, sehingga mengalami beberapa kesulitan dalam pengelolaan administrasi keuangan yang berbasis elektronik ;
2. Tuntutan atas perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana ;
3. Masih ada kegiatan yang belum dapat menyerap dana secara maksimal sehingga anggaran yang tersedia masih ada yang tersisa ;
4. Terdapat banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa adanya IMB ;
5. Terdapat banyak wajib Pajak yang tidak membayar PBB terutama pemilik gedung walet, sehingga target PBB setiap tahun tidak bisa tercapai sesuai target.

b. Solusi

1. Perlu adanya bimtek aparatur guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan terutama dibidang IT sehingga dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan kecamatan bisa terlaksana dengan cepat dan tepat;
2. Mengajukan usulan penambahan personil ASN dan pengadaan sarana prasarana kerja guna menunjang kelancaran operasional kecamatan;
3. Dalam penghitungan gaji pegawai selalu dilebihkan hal ini untuk menyikapi kemungkinan adanya kenaikan gaji berkala (KGB), kenaikan gaji ASN, kenaikan pangkat, kenaikan tambahan penghasilan dll. Dalam hal ini perlu adanya perencanaan yang tepat dalam hal penghitungan gaji pegawai.
4. Perlu dibentuk tim monitoring yang bekerjasama dengan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) guna penertiban kembali pembuatan IMB ;
5. Penertiban kembali penagihan PBB khususnya kepada pemilik gedung walet dengan memberikan sanksi apabila tidak dibayarkan.

D. PRESTASI

Sehubungan dengan adanya kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Metro, yang diselenggarakan pada bulan Maret Tahun 2023, Kelurahan Mulyojati meraih juara ke 3, dan pada Lomba P3KSS di Bulan November Kelurahan Mulyojati meraih juara harapan 2 di Tingkat Propinsi.

E. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN METRO BARAT,

Evaluasi Capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Kecamatan Metro Barat sebagaimana Tabel 17 terlampir.

Tabel 17
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Kecamatan Metro Barat 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN					
					TARGET 2021	REALISASI 2021	%	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) a. Pengantar KK b. Advis IMB c. Rekomendasi Izin Usaha d. Rek. Nikah	82%	70%	85,37			

				Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	85%	85%	100,00			
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	85%	63,57%	74,79			
				Presentase Penanganan Konflik	100%	100%	100,00			

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Kecamatan Metro Barat secara struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah mencapai keberhasilan namun belum optimal, disamping itu tentu ada kekurangan yang disebabkan berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas.

Kecamatan Metro Barat dengan segala keterbatasan yang ada, baik menyangkut sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan maupun kemampuan anggaran, telah berupaya seoptimal mungkin menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat demi tercapainya Visi Kota Metro

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Metro Barat Tahun 2022 telah mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antara aparatur kecamatan, aparatur kelurahan dan para Pamong kelurahan dengan instansi vertikal yang berada di wilayah Kecamatan Metro Barat, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Metro Barat.

Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang kelurahan maupun musrenbang kecamatan menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang tinggi walaupun masih dibawah target 2022. Hal ini sangat berguna untuk mewujudkan program pembangunan di wilayah kecamatan Metro Barat.

Kinerja yang dicapai dalam tahun 2022 merupakan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2022 yang sesuai dengan prosedur dan norma yang berlaku.

CAMAT METRO BARAT,

TRIYONO, S.Sos

Pembina

NIP.19680722 199402 1 002

